



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2016

DINAS SOSNAKERTRANS KABUPATEN MERANGIN



**DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN MERANGIN**

Jalan Pemuda Komp. IBRD KM. 2 Bangko
Telp./fax. (0746) 21185

2016

KATA PENGANTAR

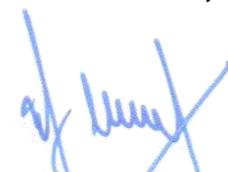
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui terwujudnya Good Governance yang merupakan terselenggaranya Manajemen Pemerintah dan Pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksud diperlukan sistem Akuntabilitas yang baik dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan hal tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin Tahun 2016 sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin Tahun 2016 ini merupakan aplikasi dan pertanggungjawaban dari Rencana Strategis Kabupaten Merangin yang telah dituangkan selama tahun 2014 – 2018.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin ini mampu memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait sebagai instrumen dan mengevaluasi sejauh mana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin selama tahun 2016 ini untuk memantapkan Manajemen Pemerintah dan Pembangunan yang akuntabel. Demikian laporan ini disusun semoga ada manfaatnya dan selalu menerima saran, kritik dalam rangka penyempurnaan masa yang akan datang

Bangko, Desember 2016

KEPALA DINAS,



Drs. H. HAMBALI
Pembina Utama Muda
NIP.196410121989011004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Tugas Pokok	4
1.3.1 tugas Pokok	4
1.4 Sumber Daya SKPD.....	14
1.4.1 Sarana dan Prasarana	14
1.4.2 Dukungan Personil.....	15
1.4.3 Mitra Kerja	16
1.5 Sistematika Laporan kinerja Instansi Pemerintah.....	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
2.1 Rencana Strategis	19
2.1.1 Visi	19
2.1.2 Misi	19
2.1.3 Tujuan	21
2.1.4 Sasaran	22
2.1.5 Indikator Kinerja.....	23
2.1.6 Perjanjian Kinerja	23
2.1.7 Kebijakan	24
2.1.8 Program Instansi	26

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
	3.1 Pengukuran Kinerja	33
	3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	33
	3.1.2 Metode Penyimpulan Kinerja.....	34
	3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisa Kinerja	35
	3.3 Akuntabilitas Keuangan	47
B A B I V	P E N U T U P.....	48

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Laporan yang berisi tentang informasi dan data yang telah diolah serta memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan terwujudnya pembangunan yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna, maka fokus yang menjadi perhatian utama adalah dengan menitik beratkan sasaran dan tujuan pembangunan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian dalam menetapkan arah dan kebijakan pembangunan tersebut harus mempertimbangkan aspek logis, realistis, efektif dan efisien, akuntabel dan transparan, serta dilakukan dengan mengikuti norma, standar, prosedur dan kriteria, sehingga sinergitas program pembangunan yang akan dijalankan dapat terjamin keberlangsungannya secara berkesinambungan.

Berangkat dari pemikiran diatas, maka dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pembangunan yang lebih baik, diperlukan penguatan terhadap dokumen perencanaan strategis yang lebih berkualitas, terukur dan dapat beradaptasi dengan lingkungan internal maupun eksternal, serta dapat diimplementasikan dengan mudah, cepat dan tepat pada sarannya.

Pada konteks pembangunan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, masih menjadi salah satu prioritas utama dan yang sangat mendasar untuk terus dilakukan penanganannya, bukan saja dalam kontelasi bahwa permasalahan sosial merupakan fenomena yang banyak terjadi akibat yang ditimbulkan dari kondisi masyarakat dengan keterbelakangan dan kemiskinannya, akan tetapi penyelenggaraan dalam pembangunan masalah sosial merupakan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang mengharuskan negara memberikan perlakuan sosial yang berkeadilan bagi seluruh masyarakatnya, termasuk didalamnya meningkatkan aksesibilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Di tahun 2016 Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu mempunyai 19 program dan 67 kegiatan dan selama tahun 2016 ini dapat berjalan dengan baik..

Adapun sasaran yang telah ditetapkan antara lain :

- a. Meningkatkan Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- b. Peningkatan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja
- c. Peningkatan Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja
- d. Peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin tahun 2016 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) total anggaran belanja yang bersumber dari APBD setelah perubahan tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2.761.288.750- dengan realisasi Rp. 2.743.495.078,- atau 99,36 %.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016 ini permasalahan secara prinsip tidak ada. Namun demikian permasalahan ini, bukan disebabkan permasalahan internal SKPD, akan tetapi semata - semata disebabkan oleh faktor eksternal sehingga harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang ada.

Namun demikian secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2016 telah dapat dicapai dengan baik dan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pencapaian visi dan misi untuk peningkatan dan perbaikan terhadap kinerja Dinas Sosnakertrans khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Merangin pada umumnya.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : 114. Tenaga Kerja
Organisasi : 114. 11401. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)	HASIL/KELUARAN			
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rencana	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5	6	7
114.11401.00.00.5	BELANJA	32.412.708.372,24	6.675.709.488,00			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	28.504.301.777,24	2.810.294.518,00			
114.11401.00.00.511	BELANJA PEGAWAI	28.504.301.777,24	2.810.294.518,00			
	BELANJA LANGSUNG	3.908.406.595,00	3.865.414.970,00			
113.11401.15	Program Perencanaan Tata Ruang	77.995.000,00	77.574.300,00			163.102.200,00
113.11401.15.13	Survey dan Pemetaan	77.995.000,00	77.574.300,00	4	4	ex UPT
113.11401.15.13.521	Belanja Pegawai	17.550.000,00	17.550.000,00			
113.11401.15.13.522	Belanja Barang dan Jasa	60.445.000,00	60.024.300,00			
113.11401.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin Ket dan Peny. Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya	123.791.950,00	122.529.766,00			378.356.350,00
113.11401.15.06	Penyuluhan Sosial dan Pematapan KUBE Fakir Miskin	45.506.800,00	44.487.400,00	65	65	KUBE
113.11401.15.06.521	Belanja Pegawai	12.525.000,00	11.725.000,00			
113.11401.15.06.522	Belanja Barang dan Jasa	32.981.800,00	32.762.400,00			
113.11401.15.11	Pendataan PKH Keluarga Miskin dan Pelaksanaan jambore PKH	28.285.000,00	28.042.216,00	1	1	tahun
113.11401.15.11.521	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00			
113.11401.15.11.522	Belanja Barang dan Jasa	18.685.000,00	18.442.216,00			
113.11401.15.12	Pembinaan dan Peningkatan kesejahteraan anak tidak mampu	50.000.150,00	50.000.150,00	1	1	tahun
113.11401.15.12.521	Belanja Pegawai	3.050.000,00	3.050.000,00			
113.11401.15.12.522	Belanja Barang dan Jasa	46.950.150,00	46.950.150,00			
113.11401.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	87.952.000,00	87.050.000,00			
113.11401.16.10	Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat dan Kejadian Luar Biasa	87.952.000,00	87.050.000,00	1	1	tahun
113.11401.16.10.521	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00			
113.11401.16.10.522	Belanja Barang dan Jasa	62.752.000,00	61.850.000,00			
113.11401.20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	92.817.800,00	92.069.100,00			
113.11401.20.06	Sosial dan Penyuluhan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	20.784.800,00	20.474.800,00	320	320	Orang
113.11401.20.06.521	Belanja Pegawai	5.300.000,00	5.300.000,00			
113.11401.20.06.522	Belanja Barang dan Jasa	15.484.800,00	15.174.800,00			
113.11401.20.07	Fasilitasi dan Pembinaan Penyandang Penyakit Sosial (Orang Gila, Gepeng, PSK dan Penyandang Cacat)	72.033.000,00	71.594.300,00	1	1	tahun
113.11401.20.07.521	Belanja Pegawai	9.075.000,00	9.075.000,00			
113.11401.20.07.522	Belanja Barang dan Jasa	62.958.000,00	62.519.300,00			
113.11401.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	73.794.600,00	73.339.650,00			
113.11401.21.05	Fasilitasi dan Pembinaan Karang Taruna	46.732.600,00	46.677.650,00	12	12	Kali
113.11401.21.05.521	Belanja Pegawai	6.800.000,00	6.800.000,00			
113.11401.21.05.522	Belanja Barang dan Jasa	39.932.600,00	39.877.650,00			
113.11401.21.06	Pelestarian Nilai-Nilai Kejuangan	27.062.000,00	26.662.000,00	1	1	Organisasi
113.11401.21.06.521	Belanja Pegawai	5.700.000,00	5.700.000,00			
113.11401.21.06.522	Belanja Barang dan Jasa	21.362.000,00	20.962.000,00			
114.11401.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.127.609.070,00	1.100.793.854,00			
114.11401.01.01	Pebyanan Jasa Surat menyurat	2.685.000,00	1.549.070,00	1	1	tahun
114.11401.01.01.522	Belanja Barang dan Jasa	2.685.000,00	1.549.070,00			
114.11401.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	55.473.057,00	3	3	Jenis
114.11401.01.02.522	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	55.473.057,00			
114.11401.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	15.000.000,00	12.108.000,00	5	5	Unit
114.11401.01.06.522	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	12.108.000,00			
114.11401.01.07	Penyediaan Administrasi Keuangan	80.100.000,00	80.100.000,00	14	14	Orang
114.11401.01.07.521	Belanja Pegawai	80.100.000,00	80.100.000,00			
114.11401.01.08	Pebyanan Jasa Kebershan Kantor	10.404.570,00	10.397.150,00	16	16	Item

1	2	3	4	5	6	7
114.11401.01.08.522	Belanja Barang dan Jasa	10.404.570,00	10.397.150,00			
114.11401.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	37.845.000,00	37.750.000,00	21	21	Item
114.11401.01.10.522	Belanja Barang dan Jasa	37.845.000,00	37.750.000,00			
114.11401.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.540.000,00	20.540.000,00	6	6	Item
114.11401.01.11.522	Belanja Barang dan Jasa	20.540.000,00	20.540.000,00			
114.11401.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.620.000,00	5.620.000,00	4	4	Item
114.11401.01.12.522	Belanja Barang dan Jasa	5.620.000,00	5.620.000,00			
114.11401.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000,00	21.990.000,00	1	1	tahun
114.11401.01.15.522	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	21.990.000,00			
114.11401.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	52.200.000,00	47.377.500,00	89	85	Orang
114.11401.01.17.522	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	47.377.500,00			
114.11401.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	325.000.000,00	324.960.127,00	265	262	Orang/kali
114.11401.01.18.522	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	324.960.127,00			
114.11401.01.19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekhnisi Kantor	161.900.000,00	161.900.000,00	28	28	Orang
114.11401.01.19.521	Belanja Pegawai	161.900.000,00	161.900.000,00			
114.11401.01.20	Penyediaan Dana Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	146	146	Orang
114.11401.01.20.522	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00			
114.11401.01.22	Operasional UPTD Suku Anak dalam	80.685.000,00	80.623.850,00	1	1	tahun
114.11401.01.22.521	Belanja Pegawai	16.550.000,00	16.550.000,00			
114.11401.01.22.522	Belanja Barang dan Jasa	64.135.000,00	64.073.850,00			
114.11401.01.23	Operasional UPTD Penanggulangan Kemiskinan	110.450.000,00	110.400.600,00	1	1	tahun
114.11401.01.23.521	Belanja Pegawai	37.560.000,00	37.560.000,00			
114.11401.01.23.522	Belanja Barang dan Jasa	72.890.000,00	72.840.600,00			
114.11401.01.24	Operasional UPTD BPTK	100.179.500,00	100.004.500,00	1		tahun
114.11401.01.24.521	Belanja Pegawai	19.560.000,00	19.560.000,00			
114.11401.01.24.522	Belanja Barang dan Jasa	80.619.500,00	80.444.500,00			
114.11401.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	559.785.675,00	554.229.650,00			
114.11401.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	98.365.000,00	3	3	paket
114.11401.02.03.521	Belanja Pegawai	4.050.000,00	4.050.000,00			
114.11401.02.03.522	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00	4.450.000,00			
114.11401.02.03.523	Belanja Modal	90.000.000,00	89.865.000,00			
114.11401.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	85.396.200,00	83.250.200,00	4	4	Unit
114.11401.02.05.523	Belanja Modal	85.396.200,00	83.250.200,00			
114.11401.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	36.314.275,00	36.293.250,00	5	5	Unit
114.11401.02.07.523	Belanja Modal	36.314.275,00	36.293.250,00			
114.11401.02.09	Pengadaan Perakitan Gedung Kantor	121.316.200,00	121.211.200,00	12	12	Unit
114.11401.02.09.521	Belanja Pegawai	4.300.000,00	4.300.000,00			
114.11401.02.09.522	Belanja Barang dan Jasa	2.016.200,00	2.016.200,00			
114.11401.02.09.523	Belanja Modal	115.000.000,00	114.895.000,00			
114.11401.02.10	Pengadaan Meubeler	24.650.000,00	24.603.000,00	15	15	Unit
114.11401.02.10.523	Belanja Modal	24.650.000,00	24.603.000,00			
114.11401.02.11	Pengadaan Komputer/PC	36.800.000,00	36.055.000,00	7	7	Unit
114.11401.02.11.523	Belanja Modal	36.800.000,00	36.055.000,00			
114.11401.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	4.680.000,00	4.680.000,00	1	1	Unit
114.11401.02.21.522	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00			
114.11401.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.009.000,00	13.980.000,00	1	1	Unit
114.11401.02.22.522	Belanja Barang dan Jasa	14.009.000,00	13.980.000,00			
114.11401.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	77.920.000,00	77.252.000,00	13	13	Unit
114.11401.02.24.522	Belanja Barang dan Jasa	77.920.000,00	77.252.000,00			
114.11401.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perakitan Gedung Kantor	10.750.000,00	10.590.000,00	27	27	Unit
114.11401.02.28.522	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.590.000,00			
114.11401.02.30	Pemeliharaan Berkala Taman Makam Pahlawan Patriot Bhakti Bangko	47.950.000,00	47.950.000,00	1	1	Unit
114.11401.02.30.521	Belanja Pegawai	9.600.000,00	9.600.000,00			
114.11401.02.30.522	Belanja Barang dan Jasa	38.350.000,00	38.350.000,00			
114.11401.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.950.000,00	28.901.000,00			
114.11401.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	28.950.000,00	28.901.000,00	70	70	Stel
114.11401.03.05.521	Belanja Pegawai	500.000,00	500.000,00			
114.11401.03.05.522	Belanja Barang dan Jasa	28.450.000,00	28.401.000,00			
114.11401.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	36.330.300,00	36.092.300,00			
114.11401.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	36.330.300,00	36.092.300,00	1	1	tahun

1	2	3	4	5	6	7
114.11401.05.03.522	Belanja Barang dan Jasa	36.330.300,00	36.092.300,00			
114.11401.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75.883.000,00	74.643.000,00			
114.11401.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.620.000,00	39.090.000,00	3	3	Dok
114.11401.06.01.521	Belanja Pegawai	7.760.000,00	7.760.000,00			
114.11401.06.01.522	Belanja Barang dan Jasa	31.860.000,00	31.330.000,00			
114.11401.06.02	Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	20.728.000,00	20.368.000,00	1	1	Dok
114.11401.06.02.521	Belanja Pegawai	4.100.000,00	4.100.000,00			
114.11401.06.02.522	Belanja Barang dan Jasa	16.628.000,00	16.268.000,00			
114.11401.06.05	Penyusunan Laporan Tahunan	15.535.000,00	15.185.000,00	3	3	Dok
114.11401.06.05.521	Belanja Pegawai	1.450.000,00	1.450.000,00			
114.11401.06.05.522	Belanja Barang dan Jasa	14.085.000,00	13.735.000,00			
114.11401.07	Program Penyelenggaraan SPIP	9.631.500,00	9.631.500,00			
114.11401.07.02	Pelaksanaan SPIP	9.631.500,00	9.631.500,00	1	1	Dok
114.11401.07.02.521	Belanja Pegawai	1.440.000,00	1.440.000,00			
114.11401.07.02.522	Belanja Barang dan Jasa	8.191.500,00	8.191.500,00			
114.11401.08	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan	46.002.000,00	46.002.000,00			
114.11401.08.02	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	15.284.000,00	15.284.000,00	3	3	Dok
114.11401.08.02.521	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00			
114.11401.08.02.522	Belanja Barang dan Jasa	11.684.000,00	11.684.000,00			
114.11401.08.04	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	30.718.000,00	30.718.000,00	2	2	Dok
114.11401.08.04.521	Belanja Pegawai	6.270.000,00	6.270.000,00			
114.11401.08.04.522	Belanja Barang dan Jasa	24.448.000,00	24.448.000,00			
114.11401.10	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan	28.038.000,00	28.004.000,00			
114.11401.10.01	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	28.038.000,00	28.004.000,00	1	1	Kali
114.11401.10.01.521	Belanja Pegawai	7.165.000,00	7.165.000,00			
114.11401.10.01.522	Belanja Barang dan Jasa	20.873.000,00	20.839.000,00			
114.11401.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.191.040.500,00	1.191.040.500,00			1.454.718.500,00
114.11401.15.07	Pemeliharaan Rutih/Berkala Sarana dan Prasarana BLK	31.040.500,00	31.040.500,00	30	30	Unit
114.11401.15.07.521	Belanja Pegawai	4.800.000,00	4.800.000,00			
114.11401.15.07.522	Belanja Barang dan Jasa	26.240.500,00	26.240.500,00			
114.11401.15.26	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub Kejuruan las (APBD kab)	50.000.000,00	50.000.000,00	16	16	Orang
114.11401.15.26.521	Belanja Pegawai	11.725.000,00	11.725.000,00			
114.11401.15.26.522	Belanja Barang dan Jasa	38.275.000,00	38.275.000,00			
114.11401.15.27	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub Kejuruan Menjahit (APBD kab)	50.000.000,00	50.000.000,00	16	16	Paket
114.11401.15.27.521	Belanja Pegawai	11.725.000,00	11.725.000,00			
114.11401.15.27.522	Belanja Barang dan Jasa	38.275.000,00	38.275.000,00			
114.11401.15.29	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub Kejuruan montir mobil (APBD kab)	50.000.000,00	50.000.000,00	16	16	Orang
114.11401.15.29.521	Belanja Pegawai	11.725.000,00	11.725.000,00			
114.11401.15.29.522	Belanja Barang dan Jasa	38.275.000,00	38.275.000,00			
114.11401.15.30	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub Kejuruan montir sepeda motor (APBD kab)	50.000.000,00	50.000.000,00	16	16	Orang
114.11401.15.30.521	Belanja Pegawai	11.725.000,00	11.725.000,00			
114.11401.15.30.522	Belanja Barang dan Jasa	38.275.000,00	38.275.000,00			
114.11401.15.37	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Menjahit (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Tabir Ulu	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
114.11401.15.37.521	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
114.11401.15.37.522	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 38	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Menjahit (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Pamenang Sebatan	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 39	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Menjahit (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Batang Mesumai	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 40	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Menjahit (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Bangko Barat	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 41	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Sepeda Motor (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Margo Tabir	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 42	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Sepeda Motor (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Renah Pembarap	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
1.14 . 1.14.01. 15 . 43	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Sepeda Motor (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Pamnang Barat	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 44	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Sepeda Motor (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Tabir	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 45	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Sepeda Motor (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Tabir Lintas	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 46	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Anyaman Pandan (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Tabir Barat	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 47	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Teknisi HP (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Bangko	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 48	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Teknisi HP (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Pamenang	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 49	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Bordir (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Tiang Pumpung	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 50	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Bordir (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Tabir Ilir	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 51	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Elektronik TV (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Sungai Tenang	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 52	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Elektronik TV (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Muara Siau	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 53	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Menjahit (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec.Nalo Tantan	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 54	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Salon Kecantikan (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Jangkat	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 55	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Salon Kecantikan (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Lembah Masurai	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 56	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Kompos (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Renan Pamenang	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 57	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Bio Gas (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. TabirTimur	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 58	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Tata Boga (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Tabir Selatan	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 59	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Menjahit (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Pangkalan Jambu	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
1.14 . 1.14.01. 15 . 60	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Sub.Kejuruan Menjahit (Program SAMISAKE Prov.Jambi) Kec. Sungai manau	40.000.000,00	40.000.000,00	16	16	Orang
	Belanja Pegawai	9.100.000,00	9.100.000,00			
	Belanja Barang dan Jasa	30.900.000,00	30.900.000,00			
114.11401.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100.000.000,00	95.388.000,00			
114.11401.16.01	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	20.000.000,00	19.249.500,00	1	1	Dokumen
114.11401.16.01.521	Belanja Pegawai	4.600.000,00	4.600.000,00			
114.11401.16.01.522	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	14.649.500,00			
114.11401.16.08	Pembinaan/Pengembangan Kelembagaan Produktifitas Tenaga Kerja	20.000.000,00	19.993.500,00	10	10	Lembaga
114.11401.16.08.521	Belanja Pegawai	4.000.000,00	4.000.000,00			
114.11401.16.08.522	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	15.993.500,00			
114.11401.16.09	Seleksi dan Pelatihan Calon Tenaga Kerja	60.000.000,00	56.145.000,00	10	10	Lembaga
114.11401.16.09.521	Belanja Pegawai	15.380.000,00	15.380.000,00			

1	2	3	4	5	6	7
114.11401.16.09.522	Belanja Barang dan Jasa	44.620.000,00	40.765.000,00			
114.11401.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	163.678.000,00	163.448.750,00			
114.11401.17.02	<i>Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</i>	25.000.000,00	25.000.000,00	20	22	Kasus
114.11401.17.02.521	Belanja Pegawai	5.000.000,00	5.000.000,00			
114.11401.17.02.522	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00			
114.11401.17.03	<i>Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</i>	22.400.000,00	22.400.000,00	6	6	Badan Usaha
114.11401.17.03.521	Belanja Pegawai	4.200.000,00	4.200.000,00			
114.11401.17.03.522	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	18.200.000,00			
114.11401.17.05	<i>Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja</i>	46.707.000,00	46.567.750,00	50	50	Badan Usaha
114.11401.17.05.521	Belanja Pegawai	5.820.000,00	5.820.000,00			
114.11401.17.05.522	Belanja Barang dan Jasa	40.887.000,00	40.747.750,00			
114.11401.17.09	<i>Pembinaan/Penyuluhan Fungsi dan Peran Lembaga Ketenagakerjaan</i>	24.020.000,00	24.020.000,00	50	50	Badan Usaha
114.11401.17.09.521	Belanja Pegawai	3.600.000,00	3.600.000,00			
114.11401.17.09.522	Belanja Barang dan Jasa	20.420.000,00	20.420.000,00			
114.11401.17.11	<i>Pengumpulan data Kebutuhan Hidup Minimum</i>	15.551.000,00	15.461.000,00	6	6	Kecamatan
114.11401.17.11.521	Belanja Pegawai	3.080.000,00	3.080.000,00			(harga pasar)
114.11401.17.11.522	Belanja Barang dan Jasa	12.471.000,00	12.381.000,00			
114.11401.17.12	<i>Peringatan Bulan K3 dan Penghargaan K3 bagi Perusahaan</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	100	100	perusahaan
114.11401.17.12.521	Belanja Pegawai	3.375.000,00	3.375.000,00			
114.11401.17.12.522	Belanja Barang dan Jasa	26.625.000,00	26.625.000,00			
208.11401.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	85.107.200,00	84.677.600,00			
208.11401.15.02	<i>Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi</i>	85.107.200,00	84.677.600,00	2	2	Eks UPT
208.11401.15.02.521	Belanja Pegawai	21.300.000,00	21.300.000,00			
208.11401.15.02.522	Belanja Barang dan Jasa	63.807.200,00	63.377.600,00			
	JUMLAH BELANJA	32.412.708.372,24	6.675.709.488,00			

Bangko, Desember 2016

KEPALA DINAS


Drs. H Hamzah

NIP. 196110121983031004

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Keterangan			
8			
20,60%	25.736.998.884		
		77.995.000	1
		123.791.950	2
99,46%	87.952.000		3
		92.817.800	4
		73.794.600	5
		1.127.609.070	6
97,76%	559.785.675		7
		28.950.000	8
		36.330.300	9
99,14%	75.883.000		10
		9.631.500	11
		46.002.000	12
100,00%	28.038.000		13
		1.191.040.500	14
		100.000.000	15
		163.678.000	16
98,97%	85.107.200		17
	3.908.406.595		
98,51%			
99,39%			
99,88%			
98,52%			
97,62%			
57,69%	100%		
79,25%	100%		
80,72%	100%		
100,00%	100%		
99,93%	100%		

8	
99,75%	100%
100,00%	100%
100,00%	100%
87,96%	100%
90,76%	96%
99,99%	99%
100,00%	100%
100,00%	100%
99,92%	100%
99,96%	100%
99,83%	0%
99,01%	
98,37%	
97,49%	
99,94%	
99,91%	
99,81%	
97,98%	
100,00%	
99,79%	
99,14%	
98,51%	
100,00%	
99,83%	
99,83%	
99,34%	

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten merangin merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin yang memiliki tugas pemerintahan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Keberhasilan program tersebut akan tergambar dari angka kemiskinan, dimana pada saat memasuki Tahun 2016 kondisi sosial masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan yang relative cukup tinggi, meskipun rasionya masih berada dibawah rata-rata nasional. Kondisi kemiskinan ini, dapat menyebabkan pertumbuhan daerah menjadi melambat, bila upaya-upaya terhadap penanggulangan dan pengentasan kemiskinan tidak dilakukan secara komprehensif dan lintas program, artinya upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara bersama-sama, berkelanjutan dan bersinergi dengan program-program yang arah dan kebijakannya menyentuh langsung pada persoalan akar rumput. Persoalan kemiskinan akan menjadi meluas, ketika faktor sosial menjadi penyebab utama yang timbul akibat kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dengan baik, baik dalam konteks kemiskinan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial maupun budaya. Penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian merupakan bagian dari upaya pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memegang peranan penting dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat

Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu, pembangunan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata yang terukur dalam rangka peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, ketenangan berusaha dan kesejahteraan transmigran yang dilaksanakan melalui berbagai kebijakan.

Pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, dimulai dari peningkatan keterampilan tenaga kerja kemudian penempatan tenaga kerja. Setelah bekerja harus pula dilindungi haknya melalui pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial Tenaga Kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Merangin secara umum yang masih dihadapi pemerintah adalah masih tingginya angka pengangguran dan masih adanya jumlah angkatan kerja sebagian besarnya penduduk usia muda tamatan pendidikan SD, SLTP maupun SLTA yang memasuki pasar kerja dengan keterampilan yang terbatas, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja, terbatasnya peluang kerja di sector formal dan masih tingginya minat tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia tanpa adanya dukungan kesiapan tenaga kerja itu sendiri, masalah PHK, perselisihan hubungan industrial, masih terbatasnya tenaga fungsional pengawasan ketenagakerjaan serta masih adanya perusahaan yang belum melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi tenaga kerjanya dan perlindungan bagi tenaga kerja.

Dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah, selain melalui pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan, kawasan sentra produksi dan berbagai pembangunan sektoral juga dilakukan melalui pengembangan kawasan transmigrasi. Kawasan Transmigrasi merupakan kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai pemukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). WPT merupakan pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru, sedangkan LPT merupakan pengembangan permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai Kawasan Perkotaan Baru.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai wujud pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Permen ini memberikan tuntutan kepada Instansi Pemerintah untuk menyiapkan laporan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas yang utuh dikerangkakan dalam suatu sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan demikian tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatut;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatut;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan public dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

1.3 Tugas Pokok

1.3.1 Tugas Pokok

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008, dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

**“ MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
BERDASARKAN ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DI BIDANG SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI “**

Untuk melaksanakan tugas pokok diatas, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin menyelenggarakan Tugas Pokok :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Pembinaan dan pelakasnaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Secara rinci tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin yang secara operasional dilaksanakan oleh bidang dan seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan

- b. Penyiapan Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Bidang pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial
- d. Penyiapan perumusan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial
- e. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang Produktivitas, kesempatan kerja dan Transmigrasi
- f. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di Bidang Pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan
- g. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas, dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

2. SEKRETARIAT

Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Umum, kepegawaian, keuangan dan aset, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat,
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
- c. Penyelenggaraan urusan umum
- d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian
- e. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi program
- f. Pengordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- g. Pengordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana sekretariat dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberi oleh kepala Dinas.

Sekretariat membawahi :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian.
- b. Subbag Keuangan dan Aset
- c. Subbag Program

❖ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kasubbag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan umum dan kepegawaian
- c. Penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan dan rumah tangga
- d. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak, kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris.

❖ **Sub Bagian Keuangan dan Aset**

Tugas Pokok

Sub Bagian Keuangan dan aset mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam rangka penyiapan penyusunan rencana anggaran, pendapatan dan

belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi dan perbendaharaan serta pengelolaan sarana dan prasarana dinas.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana anggaran pembiayaan dan perlengkapan
- b. Penyelenggaraan Tata Usaha Keuangan
- c. Pengelolaan urusan aset dinas
- d. Penyusunan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
- e. Pelaksanaan perencanaan pengadaan, inventarisasi dan pemeliharaan aset Dinas
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

❖ **Sub Bagian Program**

Tugas Pokok

Subbagian Program mempunyai tugas pokok untuk menyusun rencana kerja seluruh bidang termasuk dana dekon/pembantuan, pengumpulan dan pengolahan data serta pengawasan, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Subbagian Program mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja setiap bidang.
- b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan unit kerja dilingkungan Dinas serta dengan instansi terkait.
- c. Penyusunan rekomendasi hasil monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan, koordinasi, konsultasi kepada kepala Dinas melalui sekretaris

- d. Melaksanakan penyusunan laporan tahunan, dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas Pokok

Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan komunitas adat terpencil, pemberdayaan lembaga dan pelestarian nilai – nilai kejuangan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dalam rangka pemberdayaan usaha kesejahteraan sosial.
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan peran serta individu, lembaga dan masyarakat;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial, membawahi :

- a. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Organisasi Sosial.
- b. Seksi Urusan Perintis Kemerdekaan, Kejuangan dan Kesetiakawanan.

4. BIDANG REHABILITASI DAN BANTUAN SOSIAL

Tugas Pokok

Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pelayanan dan pengendalian, pengaturan dan pemantauan kegiatan rehabilitasi sosial dan bantuan sosial.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Bantuan sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dan Lembaga sosial masyarakat dalam rangka pengendalian penyelenggaraan kegiatan dibidang pelayanan sosial dan rehabilitasi.
- c. Pelaksanaan bimbingan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap penderita / penyandang cacat, eks narapidana, eks penderita penyakit kusta, gelandangan, pengemis, wanita tuna susila, anak nakal, korban narkoba serta lanjut usia terlantar dan anak terlantar.
- d. Pengendalian pengaturan dan pemantauan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi Sosial dan Urusan Korban Bencana
- b. Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial

5. BIDANG PRODUKTIVITAS, KESEMPATAN KERJA DAN TRANSMIGRASI

Tugas Pokok

Bidang Produktivitas, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok penyiapan bahan rumusan kebijakan fasilitasi pembinaan, pelatihan, produktifitas dan penempatan tenaga kerja serta ketransmigrasian.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Produktivitas, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan semua tugas pokok dan fungsi Bidang Pelatihan, Penempatan dan Pengembangan Kesempatan Kerja.
- b. Melaksanakan Pelatihan, Pengukuran produktifitas dan peningkatan program penempatan tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja
- c. Koordinasi Pelaksanaan, sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja
- d. Penyusunan dan fasilitasi hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi bidang ketransmigrasian
- f. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

Bidang Produktivitas, Kesempatan Kerja dan Transmigrasi membawahi :

- a. Seksi Produktivitas dan pengembangan tenaga kerja
- b. Seksi Transmigrasi

6. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN TENAGA KERJA

Tugas Pokok

Bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melakukan usaha pembinaan hubungan industrial, perlindungan tenaga kerja, pengawasan norma/syarat kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, norma perempuan dan anak, pengawasan serta Jamsostek.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pembinaan dan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan dan pengawasan tenaga kerja
- b. Melakukan pembinaan hubungan industrial

- c. Perlindungan tenaga kerja
- d. Pelaksanaan pengawasan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja
- e. Pelaksanaan pengawasan norma kerja
- f. Pelaksanaan norma pelatihan dan penempatan tenaga kerja
- g. Pelaksanaan pengawasan norma perempuan dan anak
- h. Pelaksanaan pengawasan norma jamsostek
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pembinaan dan Pengawasan ketenagakerjaan membawahi :

- a. Seksi Hubungan Industrial dan Pengembangan Kelembagaan
- b. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja

7. UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELATIHAN TENAGA KERJA

Tugas Pokok

Kepala Balai Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, tenaga kerja calon transmigrasi, transmigran, dunia usaha dan masyarakat umum.

Fungsi

Untuk melaksanakan Tugasnya Kepala Balai Latihan Tenaga Kerja Mempunyai fungsi;

- a. Menyusun rencana program pelatihan kerja
- b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan ketenagakerjaan
- c. Pengembangan program pendidikan dan latihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan produksi, perkembangan teknologi serta peningkatan produktifitas kerja

Kepala UPTD Balai Latihan Tenaga Kerja membawahi;

- ❖ Sub. Bagian Tata Usaha

8. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINASSUKU ANAK DALAM

UPTD-SAD adalah unsur pelaksanaan sebagaimana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis yang berkedudukan di 3 (tiga) wilayah kerja yang meliputi :

- a. Wilayah 1 meliputi (Bangko, Bangko Barat, Batang Masumai, Nalo Tantan dan Renah Pembarap)
- b. Wilayah 2 meliputi (Tabir, Tabir Lintas, Tabir Timur dan Tabir Selatan)
- c. Wilayah 3 meliputi (Pamenang, Pamenang Selatan, Renah Pamenang Pamenang Barat)

Tugas Pokok

Kepala UPTD-SAD mempunyai tugas membantu sebagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang pembinaan usaha kesejahteraan sosial untuk percepatan pemberdayaan Suku Anak Dalam.

Fungsi

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala UPTD-SAD mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan Suku Anak Dalam;
- b. Menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor dan dunia usaha terhadap Komunikasi Suku Anak Dalam diwilayah kerjanya;
- c. Mendorong kelompok masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan Suku Anak Dalam (SAD);
- d. Memantau dan melaporkan dampak dari penyelenggaraan setiap program pembangunan terhadap Komunitas Suku Anak Dalam;
- e. Melaksanakan pemberdayaan perorangan, kelompok masyarakat dengan memperhatikan kondisi dan situasi, khususnya sosial budaya Suku Anak Dalam (SAD) ; dan
- f. Mendata dan memetakan kawasan-kawasan yang menjadi tempat tinggal Suku Anak Dalam.

Kepala UPTD-SAD membawahi :

- ❖ Sub. Bagian Tata Usaha

9. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN MERANGIN

Tugas Pokok

UPTD Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan di kabupaten merangin.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD-PK mempunyai fungsi :

- a. Mengkaji dan pelaksanaan analisis pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis bidang pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan;
- c. Mengkoordinasikan terhadap pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait melalui Kepala SKPD;
- d. Menangani pelayanan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. Pengkajian, penghimpunan, dan pembaharuan (Updating) database kemiskinan sesuai bidang tugas;
- f. Mengkoordinir penanggulangan kemiskinan berbasis pendidikan;
- g. Mengkoordinir penanggulangan kemiskinan berbasis kesehatan;
- h. Mengkoordinir penanggulangan kemiskinan berbasis sosial dan ekonomi dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati

Kepala UPTD Penanggulangan Kemiskinan membawahi :

- ❖ Sub. Bagian Tata Usaha

1.4 Sumber Daya SKPD

1.4.1 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari – hari sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin tampak pada tabel 1 berikut ini :

TABEL I
SARANA DAN PRASARANA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MERANGIN

NO	JENIS BARANG/NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KETERANGAN
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	- Gedung Kantor I	1	Kondis Baik
	- Gedung Kantor II	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Kantor III	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Kantor IV	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Kantor V	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Kantor TK	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Instalasi	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Pos Jaga	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Olahraga	1	Kondis Baik
	- Mess Bangko I	1	Kondisi Rusak Berat
	- Mess Bangko II	1	Kondisi Rusak Berat
	- Mess Bangko III	1	Kondisi Rusak Berat
	- Poliklinik/BP	1	Kondisi Rusak Berat
	- Gedung Teori	1	Kondis Baik
	- Gedung Workshop	1	Kondis Baik
	- Rumah Dinas (Kadis)	1	Kondis Baik
	- Gudang	1	Kondis Baik
	- Mushola	1	Kondis Baik
B.	PERALATAN DAN MESIN		
	- Alat angkutan kendaraan roda 4	7	Kondis Baik
	- Alat Angkutan Kendaraan roda 2	24	Kondis Baik
	- Alat Studio dan Komunikasi		
	Faximili	1	Kondis Baik
	Pesawat Telepon	1	Kondis Baik

1.4.2 Dukungan Personil

Jumlah Personil yang mendukung kegiatan operasional Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin berjumlah 46 Orang, untuk lebih rinci jumlah personil tampak pada tabel 2 sebagai berikut :

TABEL 2
JUMLAH PNS DILINGKUNGAN DINAS SOSNAKERTRANS
KABUPATEN MERANGIN

Pangkat	Gol	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
Pembina Utama Muda	IV/c	1	1	-
Pembina TK. I	IV/b	1	1	-
Pembina	IV/a	3	3	-
Penata TK. I	III/d	12	8	4
Penata	III/c	6	5	1
Penata Muda TK. I	III/b	8	7	1
Penata Muda	III/a	4	3	1
Pengatur TK. I	II/d	-	-	-
Pengatur	II/c	-	-	-
Pengatur Muda TK. I	II/b	3	2	1
Pengatur Muda	II/a	8	4	4

1.4.3 Mitra Kerja

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin mempunyai mitra kerja dengan berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga swasta, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 3
MITRA KERJA DINAS SOSNAKERTRANS KABUPATEN MERANGIN

NO	MITRA KERJA	JUMLAH
1.	BIDANG SOSIAL	
	Pekerja Sosial masyarakat	50 Org
	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	50 Org
	Karang Taruna	216 bh
	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	24Org
2.	BIDANG KETENAGA KERJAAN	
	Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1.993 Org
	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	6 bh
	Pelaksana penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	1 bh
	Organisasi pekerja (Federasi/Konfederensi serikat pekerja/serikat buruh)	26 bh

1.5 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative solusi yang telah dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kerja.

Bab IV Penutup

Pada bab Ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) LAKIP TA. 2016
- 2) IKU 2015-2018

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 VISI

Dengan kompleksitasnya permasalahan dalam bidang sosial dan tenaga kerja dan transmigrasi, maka peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin masa kini dan mendatang cukup menantang, sehingga setiap aparatur Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin dituntut memiliki kemampuan dalam menjawab berbagai tantangan yang terjadi.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana suatu organisasi akan dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin yang ingin dicapai yakni :

***“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT, TENAGA KERJA
DAN KETRANSMIGRAN YANG PRODUKTIF DAN KOMPETITIF UNTUK
BERBENAH MENUJU MERANGIN EMAS 2018 “***

2.1.2 MISI

Misi adalah suatu yang diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan mencapai hasil yang optimal. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak yang berkepentingan (Customer dan Stakeholder) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan mamfaat yang akan diperoleh diwaktu-waktu mendatang.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 3 (Tiga) Misi sesuai dengan peran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
2. Mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, pengembangan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja
3. Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas dibidang transmigrasi

Misi Pertama Yaitu keinginan dari Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin untuk melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan prioritas utama menurunkan angka kemiskinan bagi Fakir Miskin di Kabupaten Merangin, meningkatkan pembinaan bantuan perlindungan dan jaminan sosial melalui pemberian bantuan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melakukan pembinaan bagi anak terlantar, Panti Asuhan/Jompo, Pembinaan eks penyandang masalah kesejahteraan sosial, penyandang cacat, dan penguatan kapasitas bagi lembaga kesejahteraan sosial (LKS).

Misi Kedua Merupakan keinginan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin meningkatkan angka partisipasi angkatan kerja, meningkatkan angka kesempatan kerja serta tingkat pengangguran terbuka.

Misi Ketiga Yaitu keinginan dari Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin untuk meningkatkan pengembangan kawasan kota mandiri terpadu (KTM)

2.1.3 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Adapun tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab. Merangin adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemberdayaan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
3. Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi serta mengurangi kesenjangan pembangunan melalui Ekonomi Kerakyatan

Tabel 2.3

TUJUAN YANG DITETAPKAN UNTUK MENCAPAI VISI DAN MISI

NO	MISI	TUJUAN
1.	Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif dan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terwujudnya pemberdayaan Para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.	Mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, pengembangan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang berkompetensi
3.	Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas dibidang transmigrasi	Meningkatkan Daya Saing UMKM dan Koperasi serta mengurugin kesenjangan pembangunan melalui Ekonomi Kerakyatan

2.1.4 SASARAN

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin tahun 2014 – 2018 :

SASARAN I	Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Indikator kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya 2. Jumlah PMKS penerima bantuan sosial 3. Jumlah anak terlantar yang dibina 4. Jumlah panti asuhan/Panti jompo yang dibina 5. Jumlah pembinaan dilakukan 6. Jumlah Penyandang cacat dan trauma yang dibina 7. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS
SASARAN 2	Peningkatan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan Tingkat Pengangguran Melalui Perluasan Kesempatan Kerja
Indikator kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja 2. Angka Kesempatan Kerja
SASARAN 3	Peningkatan Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja
Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Pengangguran Terbuka
SASARAN 4	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah
Indikator Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengembangan Kawasan Kota Mandiri Terpadu (KTM)

2.1.5 INDIKATOR KINERJA

Adapun indikator kinerja pada Dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

a. Bidang Sosial

1. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya
2. Jumlah PMKS penerima bantuan sosial
3. Jumlah Anak Terlantar yang dibina
4. Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina
5. Jumlah Pembinaan dilakukan
6. Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina
7. Jumlah Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS

b. Bidang Ketenagakerjaan

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja
2. Angka Kesempatan Kerja
3. Tingkat Pengangguran terbuka

c. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

1. Persentase Pengembangan Kawasan Kota Mandiri Terpadu (KTM)

2.1.6 PERJANJIAN KINERJA

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Merangin sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
I	MISI I : Mewujudkan pelayanan sosial yang efektif fan efisien terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)		
1.	Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya	6,4 %

			Jumlah PMKS penerima bantuan sosial	627 Orang
			Jumlah Anak Terlantar yang dibina	73 Anak
			Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina	15 Panti
			Jumlah Pembinaan dilakukan	1 Kali/Tahun
			Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina	110 Anak
			Jumlah Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	32 LKS
II	MISI II : Mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif, pengembangan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja			
	2.	Peningkatan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	65,55 %
			Angka Kesempatan Kerja	174.074 Orang
	3.	Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Siap bekerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,15 %
III	MISI III : Mewujudkan pelayanan yang optimal dan berkualitas dibidang transmigrasi			
	4.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah	Persentase Pengembangan Kawasan Kota Mandiri Terpadu (KTM)	32 %

2.1.7 KEBIJAKAN

Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin pada tahun 2014-2018 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Merangin tahun 2014-2018 adalah :

A. Bidang Kesejahteraan Sosial

1. Mengurangi permasalahan sosial dan pemberian pelayanan Sosial bagi PMKS

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia pelayanan kesejahteraan sosial
4. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial.
5. Meningkatkan mutu manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial.
6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

B. Bidang Ketenagakerjaan

1. Menyiapkan SDM yang terampil dan siap bekerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK)
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi.
3. Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, out sourcing, pengupahan, PHK, serta jaminan dan perlindungan tenaga kerja.

C. Bidang Ketransmigrasian

1. Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya dalam mendukung peningkatan daya asing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan pertumbuhan wilayah-wilayah yang tertinggal.
2. Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil agar dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya.

1.1.8 PROGRAM INSTANSI

Selanjutnya pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait sebagaimana tersebut sebelumnya. Untuk mencapaisasaran yang telah dijabarkan maka dihimpun dalam bentuk kebijakan dalam program dan kegiatan. Di dalam program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. Adapun cara pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi perkantoran
- Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah
- Operasional UPTD SAD

- Operasional UPTD penanggulangan kemiskinan
- Operasional UPTD BPTK

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- Pembangunan gedung kantor
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- Pengadaan perlengkapan rumah jabatan / dinas
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas
- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan mebeleur
- Pengadaan komputer
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
- Pemeliharaan ritin/berkla peralatan gedung kantor
- Pengadaan AC
- Pengadaan alat studio / komunikasi
- Pengadaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- Pemeliharaan berkala TMP Bangko

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- Penyusunan laporan capaian kinerjaSKPD
- Penyusunan laporan keuangan semesteran

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan laporan tahunan
- Penatausahaan dan penyusunan aset SKPD

7. Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- Pelaksanaan SPIP

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

9. Program Visualisasi Hasil Pembangunan

- Penyelenggaraan pameran pembangunan

10. Program Peningkatan Kualitas dan Produktipitas Tenaga Kerja

- Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana BLK
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan montir / sepeda motor
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan bordir
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan elektronik TV
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan las
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan salon kecantikan
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan montir mobil
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan anyaman bambu
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan membatik
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan kursi bambu
- Pendidikan dan pelatihan keterampilan teknisi HP

10. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

- Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping sosial, pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

- Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- Pembinaan suku anak dalam (SAD)
- Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
- Penyuluhan sosial dan pementapan KUBE fakir miskin
- Pendataan PKH, keluarga miskin dan pelaksanaan jambore PHK
- Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan anak tidak mampu

11. Program pengembangan wilayah transmigrasi

- Penyediaan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
- Penyediaan lembaga keuangan daerah yang membantu modal usaha dikawasan transmigrasi
- Pengerahan dan fasilitasi perpindahan penduduk transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
- Inventarisasi calon lokasi transmigrasi
- Identifikasi calon lokasi transmigrasi
- RTSP calon transmigrasi
- Penyediaan aral transmigrasi
- Pelayanan administrasi UPT
- Peningkatan Kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

12. Program peningkatan kesempatan kerja

- Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
- Kerjasama pendidikan dan pelatihan
- Penyiapan tenaga kerja siap pakai
- Pengembangan kelembagaan produktitas dan pelatihan kewirausahaan
- Pemberian pasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
- Pembinaan dan pengembangan kelembagaan produktifitas tenaga kerja

- Seleksi dan pelatihan calon tenaga kerja

13. Program pelayanan rehabilitas kesejahteraan sosial

- Pelatihan keterampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat
- Penanganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tangap cepat darurat
- Pengadaan Tanah Suku Anak Dalam
- Penyuluhan sosial daerah rawan bencana

14. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

- Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja
- Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial
- Fasilitasi penyelesaian pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
- Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
- Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
- Peningkatan Bulan K3 dan Penghargaan K3 bagi perusahaan
- Pembinaan /Penyuluhan Fungsi dan Peran lembaga ketenaga kerjaan
- Pengumpulan data kebutuhan hidup minum
- Pembinaan /Penyuluhan Fungsi dan peran lembaga ketenagakerjaan
- Sosialisasi Impres Nomor 9 /2013 tentang kebijakan Penetapan Upah Minimum Provinsi

15. Program Pembinaan Anak Terlantar

- Peningkatan dan Pengembangan bakat anak terlantar
- Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik

16. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

- Pendataan penyandang cacat dan penyakit Kejiwaan
- Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni asuhan/pantiy jompo

17. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks, Narapidana, PSK dan Narkoba)

- Pendidikan dan Pelatihan keterampilan bagi eks penyandang penyakit sosial
- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
- Penertiban/razia, konsultasi, dan monev terhadap penyandang penyakit sosial (Razia PSK, Gepeng, Orang Gila)
- Fasilitasi dan Pembinaan penyandang penyakit sosial

18. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

- Peringatan hari – hari besar Nasional dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- Pembinaan Karang Taruna dan PSM dan Orsos/panti
- Temu Konsultasi Karang Taruna
- Pelestarian Nilai – nilai kejuangan

19. Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

- Rehabilitasi sedang/berat panti asuhan /panti jompo
- Operasional dan pemeliharaan sarana dan panti asuhan/jompo
- Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan tenaga pendidik
- Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan.panti jompo

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan rencana strategis instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, maka akan dapat diambil suatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program/kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Untuk melakukan pengukuran kinerja, telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri dari :
 - a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran).
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari sesuatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan.
 - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negative pada setiap tingkatan indikator yang berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Analisis yang dilakukan disini berupa realisasi atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan menggunakan indikator kinerja, input, output, dan outcome. Dan apakah program/ kegiatan yang telah dilaksanakan itu mencapai sasaran atau tidak, jika belum maka akan dilakukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018.

Pengukuran kinerja pada Tahun 2016 merupakan Tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2014-2018. Pengukuran kinerja pada tahun 2016 dilaksanakan dengan membandingkan antara target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

1.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintahan Kabupaten Merangin dilakukan dengan mengacu pada keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan dengan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran menggunakan skala ordinal yaitu :

Pengukuran dengan skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
70 < x ≤ 70	Berhasil
55 < x ≤ 70	Cukup Berhasil
<55	Tidak Berhasil

1.1.2 Metode Penyimpulan Kinerja

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “metode rata-rata data kelompok” penyimpulan capaian sasaran tersebut dijelaskan berikut ini :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean rata-rata 0 skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut.

Capaian sasaran =	$\frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah Indikator kinerja sasaran}}$
-------------------	--

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

- Sangat berhasil : 92,5
- Berhasil : 77,5
- Cukup Berhasil : 62,5
- Tidak Berhasil : 27,5

Hasil perkalian-perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil, Berhasil, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja.**

3.2 Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama, Pencapaian Penetapan Kinerja dan Analisis Kinerja

Secara umum Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2015-2018.

Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2016 yang membandingkan antara target dan realisasi pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator sasaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut :

SASARAN I :

Meningkatnya Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Pengukuran Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai capaian %	Kategori
1	Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya	29%	6,4%	45%	703	Sangat Berhasil
2	Jumlah PMKS penerima bantuan sosial	445 Orang	627 Orang	4.431 Orang	707	Sangat berhasil
3	Jumlah anak terlantar yang dibina	0	73 Anak	0	0	Tidak berhasil
4	Jumlah Panti Asuhan/Panti jompo yang dibina	25 Panti	15 Panti	25 Panti	167	Sangat berhasil
5	Jumlah pembinaan dilakukan	1 Kali/Tahun	1 Kali/Tahun	1 Kali /Tahun	100	Sangat berhasil
6	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	60	110 Anak	0	0	Tidak berhasil
7	Jumlah Lembaga Kesejahteraan sosial (LKS) yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS	7 LKS	32 LKS	10 LKS	31	Cukup berhasil

1. Persentase Penduduk Miskin yang terpenuhi kebutuhan pelayanan dasarnya

$$\text{Capaian sasaran pada indikator 1 (Kategori sangat berhasil)} = 1 \times 92,5/1 = 92,5$$

Target Tahun 2016 PMKS yang kami golongan kedalam indikator kesatu adalah Fakir Miskin. Adapun target Fakir miskin yang dibantu pada tahun 2016 adalah sebanyak 6,4%, namun terealisasi sebanyak 45%, dengan kategori sangat berhasil. Jumlah penduduk miskin yang terdata sebanyak 13.565 KK yang tersebar di 24 kecamatan, Dimana 6.109 KK atau Keluarga Penerima Manfaat dari 8 jumlah Komponen antara lain Ibu Hamil, Balita, Anak pra sekolah, SD, SMP, SMA, Lanjut Usia dan Disabilitas Berat sudah terbantu melalui Program Keluarga Harapan dengan nilai bantuan bervariasi minimal Rp. 112.500 dan maksimal 800.000. Dengan total nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 5.633.854.912 melalui kantor Pos dan Giro. Sumber dana berasal dari APBN.

Realisasi tahun 2015 dibandingkan tahun 2016 mengalami peningkatan disebabkan penambahan dana, yang tahun lalu 20 kecamatan tahun ini menjadi 24 kecamatan yang mendapat bantuan Program PKH.

2. Jumlah PMKS Penerima Bantuan Sosial

Capaian sasaran pada indikator 2 (Katagori sangat berhasil) = $(1 \times 92,5/1 = 92,5$

Pada indikator kedua berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan nilai rata-rata capaian sasaran sebesar 92,5 **dengan sangat berhasil** selengkapnya nilai capaian indikator pada sasaran kedua sesuai hasil pengukuran kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Target tahun 2016 penerima bantuan sosial ditargetkan sebanyak 627 jiwa, namun terjadi peningkatan sebanyak 707 %, sehingga total penerima bantuan sosial baik yang berupa logistik maupun pengetahuan sebanyak 4.431 jiwa, Realisasi ini melampaui target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Merangin, hal ini disebabkan tingginya korban bencana alam di Kabupaten Merangin. Adapun PMKS yang digolongkan ke indikator kedua ini yakni bantuan untuk Korban Bencana Alam dan Bantuan untuk Suku Anak Dalam.

3. Jumlah Anak Terlantar yang dibina

Capaian sasaran pada indikator 3 (Katagori tidak berhasil) = $1 \times 27,5 / 1 = 27,5$

Adapun target jumlah anak terlantar yang dibina pada tahun 2016 adalah sebanyak 73 Anak namun indikator ini tidak ada realisasi (0). Hasil pengukuran kinerja pada indikator jumlah anak terlantar yang dibina dengan nilai 0, dan dinyatakan tidak berhasil. Hal ini disebabkan

tidak adanya dana untuk melaksanakan kegiatan pembinaan anak terlantar baik pada tahun 2015 maupun pada tahun 2016

4. Jumlah Panti Asuhan/Panti Jompo yang dibina

Capaian sasaran pada indikator 4 (Katagori sangat berhasil) = 1 x 92,5 /1 = 92,5

Pada Tahun 2016, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin mentargetkan untuk panti asuhan/panti jompo yang dibina adalah sebanyak 15 Panti, namun realisasinya melebihi target yakni sebanyak 25 Panti, maka nilai capaian sebesar 167 % (sangat berhasil). Adapun keberhasilan dimkasud dikarenakan pada tahun 2016 Kabupaten Merangin mendapatkan alokasi/bantuan dari Provinsi untuk Panti di Kabupaten Merangin yakni 15 panti anak dan 10 panti jompo dengan bantuan berupa subsidi permakanan dengan sumber dana dari Provinsi Jambi.

Data Panti Anak Yang Mendapat Bantuan Subsidi Permakanan Dari Provinsi Jambi Di Kabupaten Merangin Tahun 2016

NO	NAMA PANTI	ALAMAT	KET
1	Darul Mualla	Sungai Ulak Kab.Merangin	
2	Sinar Merangin	Talang Kawo Kab.Merangin	
3	KH.Abdussatar Saleh	Renah Medan Kab.Merangin	
4	Haqqul Yakin	Muaro Panco Barat Kab.Merangin	
5	Nurul Yakin	Durian Lecah Kab.Merangin	
6	Asy'ariyah	Talang Sekuang Kab.Merangin	
7	An-nur	Markeh Kab.Merangin	
8	Al-furqon	Sekancing Kab.Merangin	
9	Subul Salam	Pulau Raman Kab.Merangin	
10	Darul Atiq	Pasar Atas Kab.Merangin	
11	Sulthon Fattah	Tambang Emas Kab.Merangin	
12	Jauharus Sa'adah	Simpang Parit Kab.Merangin	
13	Lebay Yasin	Titian Teras Kab.Merangin	
14	Al-hidayah	Koto Rayo Kab.Merangin	
15	Dhua'fa	Talang Kawo Kab.Merangin	

Data Panti Jompo yang mendapat bantuan subsidi permakanan dari Provinsi Jambi

Data Panti Anak Jompo Yang Mendapat Bantuan Subsidi Permakanan Dari Provinsi Jambi

NO	NAMA PANTI	ALAMAT	KET
----	------------	--------	-----

1	Daar Al-Muflihin	Ds.Kampung Limo Kab.Merangin
2	Syeh Maulana Qori	Titian Teras Kab.Merangin
3	Mantaab	Tambang Emas Kab.Merangin
4	Darus Salam	Pamenang Kab.Merangin
5	Maul Hajar	Renah Pembarap Kab.Merangin
6	Nurul Falah	Ngaol Kab.Merangin
7	Asy'ariyah	Muaro Panco Timur Kab.Merangin
8	Al-Furqon	Sekancing Kab.Merangin
9	Nurul Yaqin	Sungai Manau Kab.Merangin
10	An-Nur	Markeh Kab.Merangin

5. Jumlah Pembinaan yang dilakukan

Capaian sasaran pada indikator 5 (Kategori sangat berhasil) = $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$

Pada Tahun 2016, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin menargetkan untuk pembinaan yang dilakukan untuk para PMKS sebanyak 1 Kali /Tahun dan teralisasi 100 %. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dari indidkator kelima tersebut yakni :

1. Penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba

Pada tahun 2016 Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin sudah melakukan penyuluhan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada 240 orang. Adapun lokasi penyuluhan dilaksanakan di 2 sekolah antara lain : SMP 27 Limbur Merangin dengan jumlah peserta 120 orang dan Pondok Pesantren Darul Mualah Kecamatan Nalo Tantan dengan jumlah peserta 120 orang dan tujuan dilaksanakan penyuluhan ini agar mereka dapat mengerti dan paham bahaya penyalahgunaan narkoba.

2. Jumlah penyandang penyakit sosial (Orang gila, gepeng, PSK) yang dibina

Pada tahun 2016 Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin sudah melakukan pembinaan kepada 50 orang PMKS yang mengalami masalah sosial diantaranya orang gila 25 orang yang dikirim ke RS jiwa Jambi, Orang terlantar 25 orang dengan cara memberikan bantuan uang transport untuk kembali ke kampung halaman (ke Kabupaten terdekat),

6. Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma yang dibina

Capaian pada Indikator 6 (Kategori tidak berhasil) = $1 \times 27,5 / 1 = 27,5$

Pada Tahun 2016, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin menargetkan sebanyak 110 anak cacat yang dilakukan pembinaan, namun realiasinya tidak ada (0), adapun penyebab

tidak berhasilnya dari target tersebut yakni tidak ada dana dalam melaksanakan kegiatan tersebut melalui APBD, sementara dari Provinsi juga tidak ada mengalokasikan.

7. Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang memperoleh Penguatan Kapasitas dalam Penganan PMKS

Capaian pada Indikator 7 (Katagori Cukup Berhasil) = $1 \times 62 / 1 = 62,5$

Pada Tahun 2016, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin Mantargetkan bahwa Jumlah LKS yang memperoleh penguatan kapasitas dalam penanaman PMKS adalah sebanyak 32 LKS, sementara capaian yang sudah terealisasi sebanyak 10 Lembaga Kesejahteraan Sosial. Adapun kesepuluh LKS tersebut diukur dari bantuan yang masuk pada LKS tahun 2016 yakni :

NO	NAMA LKS	ALAMAT	KET
1	Daar Al-Muflihin	Ds.Kampung Limo Kab.Merangin	
2	Syeh Maulana Qori	Titian Teras Kab.Merangin	
3	Mantaab	Tambang Emas Kab.Merangin	
4	Darus Salam	Pamenang Kab.Merangin	
5	Maul Hajar	Renah Pembarap Kab.Merangin	
6	Nurul Falah	Ngaol Kab.Merangin	
7	Asy'ariyah	Muaro Panco Timur Kab.Merangin	
8	Al-Furqon	Sekancing Kab.Merangin	
9	Nurul Yaqin	Sungai Manau Kab.Merangin	
10	An-Nur	Markeh Kab.Merangin	

SASARAN 2

Peningkatan Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja

Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai capaian %	Kategori
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	64,63 %	65,55 %	64,63%	98,59 %	Sangat Berhasil
2.	Angka Kesempatan Kerja	161.363 Orang	174.074 Orang	167.702	96,33 %	Sangat Berhasil

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Capaian Indikator 1 (Katagori Sangat Berhasil) = $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$

Pada Tahun 2016, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin mentargetkan untuk Angka Partisipasi angkatan kerja sebanyak 65,55 % dan terealisasi sebanyak 64,63 % sehingga mendapat nilai capaian sebanyak 98,59 %, (Sangat berhasil). Adapun data dimaksud kami ambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin tahun 2016.

Adapun tolak ukur dalam menentukan angka partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Merangin yakni Jumlah penduduk angkatan kerja pada tahun 2016 sebanyak 167.702 jiwa dibagi dengan jumlah penduduk usia bekerja 15-64 Tahun (259.489) sehingga total 64,63 %, untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk angkatan Kerja } 167.702 \text{ Jiwa}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja } 15-64 \text{ Th} = 259.489} \times 100 \% = 64,63 \%$$

$$\text{Jumlah penduduk usia kerja } 15-64 \text{ Th} = 259.489$$

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin guna mendukung dari angka partisipasi angkatan kerja pada Tahun 2016 adalah dengan mengadakan pelatihan yang dilaksanakan di BLK

Target Pelatihan di BLK pada tahun 2016 sesuai dengan target di RPJMD Kabupaten Merangin tahun 2016 sebanyak 484 Peserta, namun yang bisa kami lakukan sebanyak 4 kegiatan berasal dari APBD kabupaten. Dimana peserta laki-laki sebanyak 39 orang dan 41 peserta perempuan. Adapun sub-sub kejuruan tersebut sebagai berikut :

1. Sub kejuruan Menjahit sebanyak 20 Orang
2. Sub kejuruan Montir Sepeda Motor sebanyak 20 Orang
3. Sub kejuruan Las sebanyak 20 Orang
4. Sub kejuruan Salon Kecantikan sebanyak 20 Orang

Target tahun 2016 sebanyak 484 orang terealisasi 80 orang maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 17 % dengan kategori tidak berhasil.

Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016 mengalami penurunan 26 % atau 368 orang. Penurunan ini diakibatkan adanya rasionalisasi anggaran Dana APBD serta pagu anggaran yang sangat minim.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu menciptakan calon tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja

2. Angka Kesempatan Kerja

Capaian Indikator 1 (Katagori Sangat Berhasil) = $1 \times 92,5 / 1 = 92,5$

Pada Tahun 2016, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin mantergetkan untuk angka kesempatan kerja di Kabupaten Merangin sebanyak 174.074 Orang, dan sudah terealisasi pada tahun 2016 sebanyak 167.702 Orang atau terealisasi sebanyak 96,33 %.

Adapun rumus untuk menetapkan angka kesempatan kerja di Kabupaten Merangin dapat dilihat dari Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Merangin.

Adapun kegiatan yang kami laksanakan guna mendukung dari angka kesempatan kerja yakni :

1. UMP Hubungan Industrial

TargetTahun 2016 sebesarRp. 1,9 juta dan terealisasiRp. 1,9 juta, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016mengalami peningkatan sebesar 89%. Adapun tujuan Upah Minimum adalah sebagai jaring pengaman bagi tenaga kerja untuk kehidupan yang layak.

2. Jumlah PHI / PHK yang terselesaikan

TargetTahun 2016 penyelesaian sebanyak 60 kasus dan terealisasisebanyak 67 kasus, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 111 % dengan kategori sangat berhasil.Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016mengalami peningkatan 69%. Banyaknya kasus PHK meningkat dikarenakan situasi ekonomi yang kurang kondusif sehingga banyak Badan Usaha/Perusahaan melakukan efisiensi kepada tenaga kerja demi kelangsungan perusahaan.

3. Jumlah perusahaan di Kecamatan yang dibina terhadap jamsostek

TargetTahun 2016 sebanyak 50 perusahaan dan terealisasisebanyak 148 perusahaan, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 296 % dengan kategori sangat berhasil.Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016mengalami peningkatan.

4. Jumlah perusahaan/Lembaga tenaga kerja yang dibina

TargetTahun 2016 sebanyak 26 Serikat Pekerja dan terealisasisebanyak 26 Serikat Pekerja, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016tidak mengalami peningkatan.

5. Jumlah Naskah Akademik yang disusun (RANPERDA Perpanjangan IMTA)

Rencana awal pada tahun 2016 Dinas Sosnakertrans Kab. Merangin akan menyediakan Raperda tentang perpanjangan izin bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja dalam Kabupaten

Merangin, namun dalam pelaksanaannya tidak berhasil hal ini dikarenakan adanya devisit anggaran pada tahun 2016 sehingga Raperda tidak dapat disediakan.

6. Tersedianya data kebutuhan hidup minimum untuk menuju UMP

Target tahun 2016 dokumen untuk menetapkan UMP sebanyak 1 Dokumen dan sudah teralisasi sebanyak 1 Dokuman. Selanjutnya TargetUMP Tahun 2016 sebanyak Rp. 1,95 juta dan terealisasi sebanyak Rp. 2,6 Juta, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil. Adapun tujuan data kebutuhan hidup minimum adalah sebagai dasar penetapan Upah Minimum Provinsi.

Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 92%.

7. Terlaksananya penerapan bulan K3 di perusahaan

TargetTahun 2016 sebanyak 100 perusahaan dan terealisasi sebanyak 100 perusahaan, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016 tidak mengalami peningkatan.

3. SASARAN 3

Peningkatan Tenaga Kerja yang terampil dan siap bekerja

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3

Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai capaian %	Kategori
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,4%	2,15 %	5,4%	251,16 %	Sangat berhasil

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian Indikator 1 (Katagori Sangat Berhasil) = 1 x 92,5 / 1 = 92,5

Pada Tahun 2016, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin mantargetkan untuk Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Merangin sebanyak 2,15 % dan sudah terealisasi sebanyak 5,4 % sehingga nilai capaian sebanyak 251,16 %.

adapun rumus tingkat pengangguran Terbuka adalah Jumlah Pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja di kali 100 % , , maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 220 % dengan kategori sangat berhasil.

TPT =	$\frac{9.020}{167.702}$	X	100%	=	5,4%	
-------	-------------------------	---	------	---	------	--

Adapaun kegiatan yang kami laksanakan guna mendukung dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Merangin Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah informasi pasar kerja yang disampaikan
TargetTahun 2016 sebanyak 1000pencari kerja dan terealisasi sebanyak 7458 pencari kerja, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 746 % dengan kategori sangat berhasil.Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016mengalami peningkatan 109% atau pencari kerja bertambah sebanyak 644 orang.Tujuan diukurnya indikator ini untuk melihat berapa besar tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Merangin. Penyebab makin banyaknya angka pencari kerja disebabkan karena masih sedikitnya lowongan kerja dan banyaknya perusahaan yang melakukan efisiensi atau pengurangan tenaga kerja.
2. Tersedianya tenaga kerja siap pakai
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana akibat tidak adanya dukungan dana baik dari APBD maupun dari APBN. Sehingga realisasi 0%.
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha
TargetTahun 2016 sebanyak 9 paket dan terealisasi11 paket (448 orang), maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 122 % dengan kategori sangat berhasil.Realisasi tahun 2015dibanding tahun 2016 mengalami peningkatan . Dimana kegiatan ini bersumber dari dana APBN. Kegiatan tersebut antara lain :
 - 1) Kegiatan Padat karya Produktif di Desa Air Batu kec. Renah Pembarap, dilaksanakan mulai tanggal 19 april 2016 s/d 03 Mei 2016 dengan lama pekerjaan 15 hari dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 66 orang. Adapun kegiatan tersebut adalah pembuatan kolam ikan.
 - 2) Kegiatan Padat karya Produktif di Dusun Baru kec. Tabir, dilaksanakan mulai tanggal 06 Meil 2016 s/d 20 Mei 2016 dengan lama pekerjaan 15 hari dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 66 orang. Adapun kegiatan tersebut adalah pembuatan kolam ikan.

- 3) Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui tenaga Kerja Muda di Kelurahan Dusun baru Kecamatan Tabir, dilaksanakan pada tanggal 02 s/d 04 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan menjahit.
- 4) Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui tenaga Kerja Muda di Desa Tanjung Rejo kecamatan Margo Tabir, dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 11 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan menjahit.
- 5) Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui tenaga Kerja Muda di Desa Sumber Agung Kecamatan Margo Tabir, dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 11 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan menjahit dan Perbengkelan.
- 6) Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui tenaga Kerja Muda di Desa Sidoharjo Kecamatan Tabir lintas, dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan menjahit dan Perbengkelan.
- 7) Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui tenaga Kerja Muda di Desa Kungkai Kecamatan Bangko, dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan menjahit
- 8) Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui tenaga Kerja Muda di Desa Bungo tanjung Kecamatan Pangkalan Jambu, dilaksanakan pada tanggal 16 s/d 18 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan Perbengkelan
- 9) Kegiatan Penciptaan Wira Usaha Baru melalui tenaga Kerja Muda di Desa Lubuk Beringin Kecamatan Muara Siau, dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 21 Mei 2016 dengan jumlah tenaga kerja 20 orang. Adapun jenis usaha yang dilaksanakan adalah kegiatan menjahit dan perbengkelan.
- 10) Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Kungkai Kecamatan bangko, dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 22 Agustus 2016, kegiatan dilaksanakan selama 15 hari dengan jumlah tenaga kerja 88 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan jalan setapak.

- 11) Kegiatan Padat Karya Infrastruktur di Desa Muara Kibul Kecamatan Tabir barat, dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 22 Agustus 2016 kegiatan dilaksanakan selama 15 hari dengan jumlah tenaga kerja 88 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan jalan setapak.
4. Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan dan lembaga produktivitas yang dibina
Target Tahun 2016 sebanyak 6 Lembaga dan terealisasi sebanyak 6 lembaga, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil. Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016 mengalami peningkatan 120% ataupun menambah 1 lembaga yang dibina. Lembaga tersebut antara lain :
- 1) Omega Syam (Komputer) di Bangko
 - 2) Reni Tenda (Tata Rias Pengantin) di Bangko
 - 3) LPK modeste Rucy (Menjahit) di Kel. Kampung Baru Kec. Tabir
 - 4) Batik Hafsah (Membatik) di Desa Kungkai kec. Bangko
 - 5) LPK Bekal Mandiri (Menjahit) di Desa Rasau Kec. Renah Pamenang
 - 6) Tunas Harapan (Menjahit, Bordir, Sablon) di Desa Tambang Emas kecamatan Pamenang Selatan.
5. Terlaksananya seleksi pelatihan magang ke jepang
Target Tahun 2016 sebanyak 60 orang dan terealisasi sebanyak 60 orang, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil.
Realisasi tahun 2015 dibanding tahun 2016 mengalami peningkatan peserta sebanyak 10 peserta.

SASARAN 4

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah

Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
Pengukuran Kinerja

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Nilai capaian %	Kategori
1	Persentase Pengembangan Kawasan Kota Mandiri Terpadu (KTM)	0	32 %	6	18,75	Tidak Berhasil

1. Persentase Pengembangan Kawasan Kota Mandiri Terpadu

Capaian sasaran (Kategori tidak berhasil) = (1 x 27,5)/1 = 27,5

Pada Tahun 2016, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Merangin menargetkan untuk Pengembangan Kawasan Kota Mandiri terpadu sebanyak 32 % namun yang terealisasi sebesar 6 % sehingga mendapat nilai capaian sebesar 18,75 %. Adapun rumus dalam menetapkan persentase pengembangan kawasan Kota Mandiri Terpadu adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Transmigrasi tertangani (3)}}{\text{Jumlah Transmigrasi yang ada (50)}} \times 100 = 6 \%$$

Rendahnya capaian ini disebabkan karena pada tahun 2016 KTM yang tertangani sebanyak 3 KTM, dimana bantuan dana bersumber dari APBN. Adapun ketiga lokasi transmigrasi tersebut berada di Desa Nalo Baru, Desa Nalo Gedang dan Desa Pulau tebakar.

Selain hal tersebut diatas, kegiatan lain yang kami laksanakan untuk pendukung persentase pengembangan Kawasan Kota Mandiri Terpadu diantaranya :

1. Terlaksananya pengembangan Transmigrasi baru
Kegiatan ini tidak dapat terlaksana karena belum tersedianya dana baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN untuk kegiatan Rencana Teknis Sarana Pemukiman (RTSP). Sehingga realisasi 0%.
2. Sangketa lahan Transmigrasi yang diselesaikan
Target Tahun 2016 sebanyak 258 sertifikat dan terealisasi sebanyak 258 sertifikat, maka nilai capaian indikator sasaran sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil. Dana bersumber dari APBN. Adapun 117 sertifikat di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat, 96 sertifikat di Desa Tambang Emas Kecamatan Pamenang Selatan dan 45 sertifikat di Desa Muara Delang Kecamatan Tabir Selatan.

2.3 Akuntabilitas Keuangan

Belanja Daerah

Anggaran belanja Dinas Sosnakertrans kabupaten Merangin dianggarkan dana sebesar Rp. 5.611.718.927 Yang terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp. 2.761.288.750 dan Belanja Tidak Langsung Rp. 2.850.430.177.

Dari total belanja Dinas Sosnakertrans kabupaten Merangin yang tercantum dalam APBD kabupaten Merangin tahun anggaran 2016 sebesar Rp.5.611.718.927 dan terealisasi sebesar Rp. 5.553.789.696, untuk lebih rincinya sebagai berikut :

1. Belanja Tidak langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.850.430.177 dan terealisasi sebesar Rp. 2.810.294.618.
2. Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.761.288.750 dan terealisasi sebesar Rp. 2.743.495.078, dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Pegawai Rp. 586.915.000
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.645.748.078
 - Belanja Modal Rp. 510.832.000

**BAB IV
PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin tahun 2016 dapat dicapai, meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya 100%. Dengan demikian, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin yang mengacu pada sasaran prioritas telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2016, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mendorong pengembangan langkah-langkah strategi dalam pencapaian sasaran program kegiatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran .
2. Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2016 baik yang bersumber pada Dana APBD maupun APBN.
3. Meningkatkan koordinasi secara intern menjadi extern dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2016, sehingga dalam upaya penyelesaian/pemecahan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara optimal.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merangin mengharapkan agar Laporan Kinerja Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting

dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Struktur Organisasi

